



**KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA KOTA
TERHADAP KOTA BERKELANJUTAN**

Amin Pujiati¹

amin.pujiati@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

J.J Sarungu²

Jj_sarungu@yahoo.com

A.M Soesilo³

am_soesilo@yahoo.com

^{2,3}Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Pembangunan kota yang berkelanjutan pada kenyataannya masih sebatas paradigma. Tantangan utamanya adalah implementasi dari kebijakan yang diambil tidak terlepas dari kepemimpinan dan tata kelola. Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi indeks pembangunan kota berkelanjutan dan menganalisis kontribusi kepemimpinan dan tata kelola kota terhadap kota berkelanjutan di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari data persepsi pendapat masyarakat kota mengenai pencapaian keberlanjutan kota dengan metode kuesioner, wawancara dan *Focuss Group Discussion (FGD)*. Responden dalam studi ini adalah masyarakat umum selaku penerima manfaat dari penyelenggaraan pembangunan terdiri dari 100 orang. Wawancara dan FGD dilakukan dengan pihak Bappeda, Kecamatan dan kelurahan. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode dokumentasi. Variabel penelitian terdiri dari kepemimpinan kota dan tata kelola kota. Hasil penelitian Kabupaten Grobogan masuk kategori kurang berkelanjutan dengan skor Indeks Pembangunan Berkelanjutan 125,49. Kontribusi kepemimpinan kota terhadap keberlanjutan kota sebesar 18,33% dan tata kelola kota sebesar 18,92%. Berdasarkan persepsi masyarakat kepemimpinan di Kabupaten Grobogan baik sedangkan tata kelola cukup baik. Untuk menuju kota yang berkelanjutan, harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah kedekatan pucuk pemerintahan dengan warga serta kemudahan partisipasi warga dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan sarana dan prasarana publik.

Kata kunci: kepemimpinan, tata kelola, kota, berkelanjutan, indeks

Abstract

Sustainable urban development on the reality is still a paradigm. The main challenge is the implementation of policy taken that can not be separated from leadership and governance. The purpose of this study to identify sustainable urban development index and analyze the contribution of urban leadership and governance to sustainable urban Grobogan District, Central Java Province. Types of data used primary and secondary data. Primary data sourced from the perception of urban community opinion regarding of the achievement of sustainable urban with method of questionnaire, interviews and Focuss Group Discussion (FGD). The respondents in this study was the general public as the beneficiaries of the Organization of the development consists of 100 people. Interviews conducted with FGD and Bappeda, districts and subdistricts. Secondary data is sourced from the Central Bureau of statistics (BPS) and methods of documentation. Research on variable consists of city leadership and governance of the city. Research results Grobogan entry categories less sustainable Sustainable Development Index with a score of 125.49. The contribution of urban leadership to the sustainability of urban is 18.33% and urban governance is 18.92%. Based on the perception of community of urban leadership in Grobogan District is good while urban governance is quite good. To get to a sustainable urban, which should be improved and corrected is the



proximity of the top government with citizens as well as the ease of citizen participation in the process of planning/implementation/supervision of public facilities and infrastructure development

Keywords: leadership, governance, urban, sustainable, Index

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang berarti harus ada perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Secara teori, dimensi tujuan pembangunan telah mengalami pergeseran paradigma. Awal kemunculan teori ekonomi pembangunan, indikator terjadinya pembangunan dilihat dari output melalui Produk Domestik Bruto (PDB), bergeser ke Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengatasi kemiskinan hingga pembangunan berkelanjutan (Kuncoro, 2010). Namun pada kenyataannya dinamika perkembangan pembangunan kota-kota di Indonesia lebih didasarkan pada eksploitasi sumber daya. Hal ini terbukti dari kurang diperhatikannya keseimbangan dalam pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi tanpa mempertimbangkan kualitas daya dukung lingkungan dan perbaikan lingkungan secara signifikan. Melihat kenyataan ini dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan masih sebatas paradigma.

Banyak bukti menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil yang tidak terlepas dari kepemimpinan dan tata kelola. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu kondisi

agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Kebijakan ataupun program pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan sisi teknis dan non teknis agar mudah diimplementasikan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan di kabupaten/kota sesuai Undang-Undang otonomi daerah. Perbelakuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) untuk mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.

Menurut (Aziz, 2016) kebijakan di setiap kota tidaklah sama dan untuk merespons perubahan yang terjadi memerlukan suatu strategi, program, dan kebijakan yang tepat melalui tata kelola perkotaan yang terencana dan terintegrasi. Salah satu hal penting untuk mewujudkannya melalui peran kepemimpinan yang tepat untuk membangun kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan adalah kota yang memiliki areal yang lebih luas serta berada pada tatanan regional dan global dimana individu yang ada bertanggung jawab dan peduli pada aset-aset



lingkungan yang ada, memperhatikan penggunaan sumber daya, dan meminimalisasi dampak kegiatan terhadap alam untuk meningkatkan kualitas lingkungan (WCED, 1987). Kawasan perkotaan di satu sisi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai pusat bisnis, namun disisi lain masalah-masalah muncul sebagai konsekuensi dari pusat bisnis tersebut. Permasalahan sampah, polusi, kemacetan, pemukiman, alih fungsi lahan, minimnya ruang terbuka hijau menjadi masalah yang harus dicari solusinya agar kota berkelanjutan dapat terwujud.

Berkaitan dengan kota berkelanjutan yang istilah lainnya kota hijau, faktor yang mempengaruhi kota hijau dan non hijau adalah pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan (Pujiati, et al., 2013). Kota yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi peluang untuk terwujudnya kota hijau rendah dan kota yang pendidikan penduduknya tinggi peluang untuk menjadi kota hijau tinggi (Pujiati, 2015). Berkaitan dengan jumlah penduduk perkotaan, (Statistik, 2000) melalui sensus penduduk tahun 2000 telah memetakan aglomerasi perkotaan yang terdiri dari kota inti dan kota *hinterland* (zone-zone). Aglomerasi perkotaan adalah wilayah perkotaan yang sesuai sesuai dengan kriteria perkotaan baik dari kepadatan penduduk maupun fasilitas-fasilitas perkotaan. Salah satu wilayah aglomerasi perkotaan di Indonesia adalah aglomerasi perkotaan Semarang yang terdiri dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. Berdasarkan identifikasi kota hijau dan non hijau di

wilayah aglomerasi perkotaan Semarang, sebagian besar kabupaten/kota di wilayah aglomerasi perkotaan masuk klasifikasi non hijau dan Kabupaten Grobogan memiliki indek kualitas lingkungan paling rendah (Pujiati, 2014).

Kabupaten Grobogan berdasarkan pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan (Tabel 1). Penurunan laju pertumbuhan penduduk seharusnya dapat meningkatkan peluang untuk menjadi kota hijau, namun kenyataannya Kabupaten Grobogan indeks kualitas lingkungan paling rendah di aglomerasi perkotaan Semarang. Potensi wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar masih merupakan lahan pertanian dan sebesar 52,5% penduduk Kabupaten Grobogan bermata pencaharian di sektor pertanian. Hal ini berarti luas lahan yang dapat ditanami juga tinggi. Luas lahan yang dapat ditanami/diolah atau lahan budidaya merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan seperti yang digunakan oleh Van dijk dan Mingshun (2005) dan (Lee & Huang, 2007) yang diistilahkan dengan *arable land* dan *permeable land*. Potensi wilayah pertanian yang tinggi menjadi peluang juga untuk menjadi kota hijau, namun kenyataannya Kabupaten Grobogan indeks kualitas lingkungan paling rendah di aglomerasi perkotaan Semarang.



Tabell
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan 2010-2015 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2010 – 2011	0,66
2011 – 2012	0,63
2012 – 2013	0,61
2013 – 2014	0,57
2014 – 2015	0,56

Sumber : BPS, Kabupaten Grobogan dalam Angka, 2017

Melihat urgensinya kota berkelanjutan dan pentingnya kontribusi kepemimpinan dan tata kelola pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan studi tentang kontribusi kepemimpinan dan tata kelola kota terhadap kota berkelanjutan. Studi ini dilakukan di Kabupaten Grobogan dengan pertimbangan Kabupaten di wilayah aglomerasi perkotaan yang indek kualitas lingkungan paling rendah, padahal perkembangan laju pertumbuhan penduduk menurun dan potensi wilayah pertanian yang tinggi sehingga peluang untuk menjadi kota berkelanjutan tinggi. Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi indeks pembangunan kota berkelanjutan dan menganalisis kontribusi kepemimpinan dan tata kelola kota terhadap kota berkelanjutan.

2. Telaah Pustaka

Hasil penelitian tentang performance kota berkelanjutan di Cina dengan menggunakan *Urban Sustainability Index* (USI) dengan variabel kebutuhan dasar, efisiensi sumber daya, kebersihan lingkungan, lingkungan fisik dan komitmen keberlanjutan

lingkungan menunjukkan bahwa penentu *performance* kota yang berkelanjutan adalah komitmen keberlanjutan lingkungan (Xiao, et al., 2010). Komitmen tidak hanya berasal dari pengelola atau pemimpin, proses tata kelola kota tetapi berasal dari seluruh masyarakat termasuk pihak swasta. Sejalan dengan penelitian pembangunan kota berkelanjutan, (SUD, 2013) mengukur indeks pembangunan kota berkelanjutan (SUD index) dengan menggunakan indeks komposit.

Adapun indikator utama adalah pemimpin kota, tata kelola kota, urbanisasi dan kependudukan, perumahan dan pemukiman. Indikator utama tersebut bersama-sama dengan indikator penunjang membentuk indeks kota berkelanjutan. Adapun indikator penunjang 1(satu) adalah resiko bencana dan perubahan iklim, kawasan tepi air, transportasi masal. Indikator penunjang 2 (dua) adalah ekonomi lokal dan sektor informal, pelestarian warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal, ruang terbuka hijau, emisi dan energi. Indikator utama akan menjadi indikator yang wajib dipenuhi oleh suatu kota atau kawasan perkotaan agar pembangunan yang sedang berlangsung dapat berkelanjutan, sedangkan indikator penunjang 1 (satu) dan indikator penunjang 2 (dua) dapat dipenuhi secara bertahap apabila indikator utama telah terpenuhi. Hasil penelitian (Fauzi & Oxtavianus, 2014) tentang *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia* dengan menggunakan Indeks komposit dan variabel yang digunakan adalah Indeks PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPB) dan Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa belum seimbang antara



pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan lebih banyak memberikan tekanan pada lingkungan. Penggunaan IPB sebagai ukuran pembangunan berkelanjutan belum optimal.

Kepemimpinan (*leadership*) sangat penting bagi suatu organisasi termasuk dalam pemerintah kabupaten/kota. Menurut (Thoha, 2007) kepemimpinan adalah suatu aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi kepemimpinan tersebut sejalan dengan pendapat (Robbins & Judge, 2015) yang mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disederhanakan pengertian kepemimpinan kota adalah kemampuan pimpinan kota untuk mempengaruhi stakeholder atau pihak-pihak tertentu dalam suatu proses kerjasama dalam rangka membangun kota yang berkelanjutan. Proses kerjasama ini melibatkan pemerintah kota, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan kota berpeluang terhadap klasifikasi kota berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedermayanti, 2003). Tata kelola pemerintahan yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan implementasi dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya

dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan (Wijayanti, 2012) Dukungan tata kelola pemerintah yang baik juga ikut meningkatkan peluang kota berkelanjutan. Keberhasilan program kota yang berkelanjutan seperti transportasi hijau tergantung oleh tata kelola pemerintah mulai dari perumusan, implementasi kebijakan, kesepakatan dan kerjasama (Gray, et al., 2017).

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian ini dengan metode studi kasus, dapat menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kontribusi kepemimpinan dan tata kelola kota terhadap kota berkelanjutan. Data yang digunakan data primer dan data sekunder pada tahun 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Grobogan. Data primer bersumber dari data persepsi pendapat masyarakat kota mengenai pencapaian keberlanjutan kota dengan metode kuesioner dan wawancara kepada responden. Responden dalam konteks ini adalah masyarakat umum selaku penerima manfaat dari penyelenggaraan pembangunan terdiri dari 100 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pemuka masyarakat dan pengambil kebijakan. Data sekunder bersumber dari BPS, pemerintah kabupaten dengan metode dokumentasi. Variabel penelitian terdiri dari Kepemimpinan kota dan tata kelola kota. Indikator kepemimpinan: Kualitas, kedekatan, koordinasi, perubahan ekonomi, perubahan sosial budaya, perubahan ekologi. Indikator



tata kelola: kemudahan perijinan, partisipasi usulan, partisipasi perencanaan, partisipasi pengadaan sarana prasarana, partisipasi pengawasan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat. Adapun pengukuran variabel diukur berdasarkan nilai komposit dari 2 (dua) jenis indikator, yaitu indikator berdasarkan data objektif (data sekunder) dan indikator berdasarkan data persepsi (data primer). Masing-masing dengan skala 1-4. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

$f(x)$ = nilai komposit indeks berdasarkan data objektif yang diperoleh dari total bobot butir x skor butir

$f(y)$ = nilai komposit indeks berdasarkan data persepsi yang diperoleh dari total bobot butir x skor

Nilai komposit yang telah diperoleh dari tiap pengukuran tersebut akan dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks pembangunan perkotaan berkelanjutan (SUD Index). Penjumlahan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $F(SUD) = 70\% f(x) + 30\% f(y)$. Kategorikan nilai total indeks yang diperoleh berdasarkan F (SUD): Sangat tidak berkelanjutan: $F(SUD) < 101,6$; kurang berkelanjutan $101,7 \leq F(SUD) < 203,2$; Cukup berkelanjutan: $203,3 \leq F(SUD) < 304,8$; Berkelanjutan: $304,9 \leq F(SUD) < 406,4$

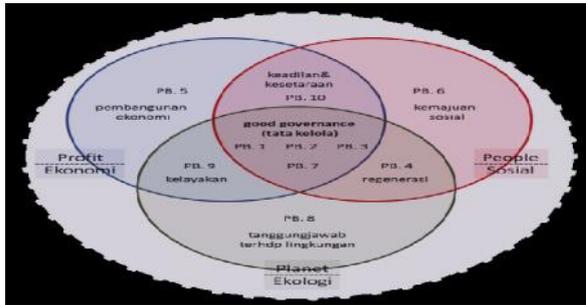
4. Hasil dan Pembahasan

Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan

Indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (SUD Index) adalah indikator kunci yang merupakan ukuran minimal suatu kota atau kawasan perkotaan

diidentifikasi sebagai kota atau kawasan perkotaan yang berkelanjutan berdasarkan Butir Prakarsa Bali pada pertemuan Di Batam tahun 2013. Adapun indikator yang digunakan meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) indikator berdasarkan data objektif dan (2) indikator berdasarkan data persepsi. Indikator berdasarkan data objektif adalah indikator yang diukur berdasarkan rekaman data sekunder yang dimiliki oleh kota/kabupaten, sedangkan indikator berdasarkan data persepsi adalah indikator yang diukur berdasarkan pendapat masyarakat kota mengenai pencapaian keberlanjutan kota atau kawasan perkotaan.

Kedua indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (SUD Index) ini disusun berdasarkan 10 butir prakarsa Bali yang masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Secara garis besar kesepuluh butir prakarsa Bali tersebut merupakan penjabaran dari 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yang meliputi: ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Kesepuluh butir prakarsa Bali ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) pilar tersebut. Untuk beberapa indikator, butir prakarsa Bali tersebut tidak sepenuhnya hanya merupakan interpretasi dari 1 (satu) pilar saja, melainkan gabungan dari beberapa pilar pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, maka terdapat butir prakarsa Bali yang merupakan interpretasi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan sekaligus. Secara rinci pengelompokan kesepuluh butir prakarsa Bali tersebut ke dalam 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar.1 Diagram Venn Butir Prakarsa Bali terhadap Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Gambar 1, maka untuk butir prakarsa Bali yang merupakan interpretasi dari 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan sekaligus merupakan indikator utama sehingga memiliki bobot terbesar yaitu 3 (tiga). Untuk butir prakarsa yang merupakan interpretasi dari 2 (dua) pilar pembangunan berkelanjutan merupakan indikator penunjang 1 sehingga memiliki bobot 2 (dua), sedangkan butir prakarsa yang merupakan interpretasi dari 1 (satu) pilar pembangunan berkelanjutan merupakan indikator penunjang 2 (dua) dan memiliki bobot 1 (satu). Adapun butir prakarsa Bali yang menjadi indikator utama dalam pengukuran indeks ini adalah butir 1 (kepemimpinan kota), butir 2 (tata kelola kota), butir 3 (urbanisasi dan kependudukan), serta butir 7 (perumahan dan permukiman). Butir prakarsa Bali yang menjadi indikator penunjang 1 dalam pengukuran indeks ini adalah butir 4 (risiko bencana dan perubahan iklim), butir 9 (kawasan tepi air), serta butir 10 (transportasi massal). Butir prakarsa Bali yang menjadi indikator penunjang 2 dalam pengukuran indeks ini adalah butir 5 (ekonomi lokal dan sektor informal), butir 6 (pelestarian warisan budaya, pusaka alam,

dan kearifan lokal), serta butir 8 (ruang terbuka hijau, emisi, dan energi). Secara lengkap indikator dan bobot pilar pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Indikator dan Bobot Butir Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Indikator	Butir Indikator	Bobot
Utama	Kepemimpinan kota	3
	Tata kelola kota	3
	Urbanisasi dan kependudukan	3
Penunjang 1	Perumahan dan permukiman	3
	Risiko bencana dan perubahan iklim	2
	Kawasan tepi air	2
Penunjang 2	Transportasi massal	2
	Ekonomi lokal dan sektor informal	1
	Pelestarian warisan budaya, pusaka alam, dan kearifan lokal	1
	Ruang terbuka hijau, emisi, dan energi	1

Sumber: SUD-FI Butir Prakarsa Bali, 2013

Untuk penerapannya, ketiga kelompok indikator tersebut dihitung secara bersamaan, hanya saja perlakuannya berbeda. Untuk kelompok indikator utama akan menjadi indikator yang wajib dipenuhi oleh suatu kota atau kawasan perkotaan agar pembangunan yang sedang berlangsung dapat berkelanjutan, sedangkan indikator penunjang 1 dan indikator penunjang 2 dapat dipenuhi secara bertahap apabila indikator utama telah terpenuhi. Secara komposit nilai total dari ketiga indikator ini akan menjadi



nilai indeks. Adapun hasil skor dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3
Indeks Komposit dan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Variabel	Indeks Komposit	F(SUD)	
	Data Subyektif	Data Obyektif	
Utama			
Kepemimpinan Kota	51,35	10,85	22,99
Tata Kelola Kota	41,65	16,07	23,74
Urbanisasi dan Kependudukan	44,29	24,43	30,39
Perumahan dan Pemukiman	43,42	7,29	18,12
Penunjang 1 Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	5,38	16,29	13,02
Kawasan Tepi Air	6,09	1,86	3,12
Transportasi Masal	10,76	3,69	5,81
Penunjang 2 Ekonomi Lokal dan Sektor Informal	2,90	2,21	2,42
Pelestarian Warisan Budaya, Pusaka Alam, dan Kearifan Lokal	5,01	2,07	2,95

Ruang Terbuka Hijau, Emisi dan Energi f(y) dan f(x)	4,88	2,07	2,92
F(SUD)	215,74	86,81	
Total F(SUD)	64,72	60,77	125,49
Kriteria	Kurang berkelanjutan		

Sumber: data primer yang diolah (2016)

Tabel 3 menunjukkan Kabupaten Grobogan berdasarkan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan dengan skor 125,49. Skor yang diperoleh Kabupaten Grobogan masuk kategori kurang berkelanjutan. Meskipun masuk kategori kurang berkelanjutan, namun dilihat dari masing-masing skor variabel utama pembentuk indeks pembangunan kota berkelanjutan termasuk tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Dijk & Mingshun, 2005) yang menjelaskan ada *tradeoff* antara lingkungan dan ekonomi. Sisi ekonomi yang diukur dengan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto, Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah rendah tetapi dari sisi lingkungan yang dibuktikan dengan indeks pembangunan kota berkelanjutan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain termasuk tinggi (Pujiati, et al., 2016).

Kepemimpinan

Kepemimpinan kota merupakan indikator utama dalam pengukuran indeks pembangunan kota berkelanjutan. Kepemimpinan kota mendorong perubahan paradigma pengelolaan kota yang visioner, kreatif dan inklusif. Tujuannya menciptakan budaya kerja pengelola kota yang mengarah



pada cara kerja visioner dalam menciptakan pembangunan kota berkelanjutan, kreatif, dan inklusif. Ciri pemimpin kota yang efektif dinilai dari output atas: a) karakter kepemimpinan yang baik b) Lingkungan dan budaya kerja yang kondusif dan c) Budaya kerja pendukung pencapaian visi dan misi

Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk pengukuran data persepsi masyarakat tentang kepemimpinan kota, ada 6 (enam) kondisi dan harapan yang berkaitan dengan kepemimpinan kota. Kondisi dan harapan tersebut yang digunakan sebagai indikator adalah a) Pucuk pemerintahan kota merupakan sosok pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik b) Kedekatan pucuk pemerintahan kota dengan warga kota c) Terjalannya koordinasi antara dinas-dinas d) Perubahan yang lebih baik di bidang ekonomi kerakyatan e) Perubahan yang lebih baik di bidang sosial budaya f) Perubahan yang lebih baik di bidang fisik lingkungan (ekologi). Secara lengkap hasil skor persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4
Indikator Kepemimpinan berdasarkan Persepsi masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 2016

No	Indikator	Skor
1.	Kualitas	3,01
2.	Kedekatan	2,32
3.	Koordinasi	2,94
4.	Perubahan ekonomi	3,15
5.	Perubahan sosial budaya	3,06
6.	Perubahan lingkungan fisik (ekologi)	2,63

Sumber: data primer diolah, 2016

Indikator yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat dalam kaitannya dengan kepemimpinan kota adalah kualitas kepemimpinan yaitu jujur, adil dan bijaksana, dekat dengan masyarakat, berprestasi dan punya kinerja yang baik. Bentuk kedekatan hubungan dengan masyarakat juga merupakan penilaian kepemimpinan kota seperti dialog langsung; tanggapan atas surat/proposal tertulis; tanggapan balik atas komentar yang ditujukan kepada beliau di akun media sosial; dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial; mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream. Keterjalanan antar dinas dalam suatu program pembangunan seperti program penataan permukiman vertikal juga menjadi point dalam penilaian kepemimpinan. Penilainya apakah dinas-dinas mengalami peningkatan kapasitas dalam proses 'belajar' bersama; dinas-dinas mendapatkan wawasan yang luas dalam menjalankan fungsi regulator dan fasilitator publik pada program tersebut; dinas-dinas selalu hadir pertemuan pembahasan program tersebut; dinas-dinas mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan program tersebut.

Penilaian kepemimpinan juga dilihat dalam hal perubahan di bidang ekonomi khususnya kesejahteraan keluarga, distribusi produk serta sistem ketenagakerjaan yang baik. Perubahan tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga perubahan di bidang sosial dan lingkungan. Bidang sosial dapat dilihat apakah lebih rukun dan harmoninya interaksi antar kelompok remaja dan antar sekolah; lebih rukun dan harmoninya



interaksi antar komunitas kampung; lebih rukun dan harmoninya kehidupan antar agama dan antar suku; bertambahnya kuantitas obyek wisata budaya; bertambahnya kualitas obyek wisata budaya. Perubahan di bidang ekonomi lingkungan dilihat apakah lingkungan lebih bersih dari sampah bertebaran; drainase lebih lancar, tidak ada selokan maupun kali yang mampet; lalu lintas lancar; kualitas udara lebih baik, karena makin banyak pohon dan berkurangnya polusi asap kendaraan. Adapun data obyektif yang dikumpulkan untuk menilai kepemimpinan kota adalah: Tingkat upaya pemimpin kota mengkomunikasikan dan menjalankan program pembangunan kota berkelanjutan dengan membangun kesadaran warga tentang visi yang dipublikasikan secara luas, diketahui dan disetujui oleh publik melalui cara yang kreatif dan inklusi dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Pada Tabel 4, Kabupaten Grobogan menurut persepsi masyarakat yang paling baik dalam hal kepemimpinan adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Hal ini tampak dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikator kepemimpinan yang paling rendah menurut persepsi masyarakat adalah kedekatan hubungan dengan masyarakat seperti dialog langsung; tanggapan atas surat/proposal tertulis; tanggapan balik atas komentar yang ditujukan kepada pemimpin di akun media sosial; dapat mengakses berita tentang kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media sosial; mengetahui kegiatan dan kondisi kedinasan pimpinan di media mainstream Hasil penghitungan indikator

kepemimpinan secara keseluruhan berdasarkan persepsi masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan masuk kriteria baik dengan pencapaian antara harapan dan kenyataan sebesar 72 %.

Hasil pengukuran indikator kepemimpinan kota berdasarkan persepsi masyarakat akan digabungkan dengan hasil pengukuran indikator berdasarkan data obyektif. Indikator yang digunakan menilai data obyektif berdasarkan ketersediaan data visi pimpinan daerah yang jelas, dan dikomunikasikan kepada warganya; kreatif dalam program pembangunannya; dan inklusif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan program pembangunannya. Skor yang diperoleh dari data obyektif sebesar 3,62 dan masuk kriteria sangat baik dengan pencapaian 90% antara harapan dan kenyataannya. Hasil penelitian ini mendukung (Xiao, et al., 2010) bahwa penentu performance kota yang berkelanjutan adalah komitmen keberlanjutan lingkungan. Komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya dari pemerintah tetapi pihak swasta dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung (Thoha, 2007) dan (Robbins & Judge, 2015) bahwa keberhasilan pelaksanaan ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kegiatan sesuai tujuan. Mengingat pentingnya kepemimpinan sebagai variabel utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu dilihat seberapa besar kontribusi kepemimpinan dalam pelaksanaan kota berkelanjutan di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat kontribusi



kepemimpinan terhadap kota berkelanjutan sebesar 18,33 %. Angka kontribusi ini merupakan angka terbesar ketiga dari seluruh variabel pembentuk indeks pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai variabel utama pembentuk indeks pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan variabel prasarat untuk menuju pembangunan berkelanjutan perlu ditingkatkan. Kelemahan indikator kepemimpinan menurut persepsi masyarakat yang dinilai paling jelek adalah indikator kedekatan pimpinan terhadap masyarakat, untuk itu perlu ditingkatkan dengan cara membangun komunikasi dua arah dan sering turun kelapangan secara langsung.

Tata Kelola Kota (*Urban Governance*)

Tata kelola kota dalam penghitungan indeks pembangunan kota berkelanjutan merupakan indikator utama. Tata kelola kota yang baik akan mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai tata kelola perkotaan yang baik. Tujuan dari tata kelola kota adalah meningkatkan peran pemangku kepentingan kota dalam pengelolaan kota berkelanjutan sebagai *agent of change*, *agent development*, dan *agent of social control* dengan tetap menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika. Target pemenuhan tata kelola kota adalah: 1) Transparansi dan keterbukaan 2) Partisipasi masyarakat 3) Akuntabilitas 4) Supremasi Hukum 5) Demokrasi 6) Profesionalisme 7) Daya tanggap, serta efisien dan efektif 8) Desentralisasi 9) Kemitraan 10) Komitmen pada lingkungan hidup 11) Peningkatan Keswadayaan masyarakat dalam membangun lingkungan perkotaan.

Implementasi tata kelola kota yang baik dapat dilihat dari indikator-indikator yang dinilai berdasarkan persepsi masyarakat yaitu a) Kemudahan dalam mengurus kartu identitas dan perizinan b) Kemudahan berpartisipasi dalam mengusulkan pembuatan/pencabutan suatu peraturan atau kebijakan publik c) Kemudahan berpartisipasi dalam proses perancangan/penyusunan suatu peraturan dan kebijakan publik d) Kemudahan berpartisipasi dalam mengusulkan pengadaan/pemeliharaan/penghancuran suatu prasarana, sarana atau fasilitas publik e) Kemudahan berpartisipasi dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan prasarana, sarana atau fasilitas publik f) Keberadaan dan kegunaan LKM/BKM bagi masyarakat dan lingkungan permukiman. Secara lengkap hasil skor persepsi masyarakat terhadap tata kelola kota di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5

Indikator Tata Kelola Kota berdasarkan Persepsi masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 2016

No	Indikator	Skor
1.	Perizinan	2,68
2.	Pendapat	2,37
3.	Perencanaan	2,01
4.	Pengadaaan sarana publik	2,24
5.	Pengawasan	1,91
6.	Lembaga masyarakat	2,68

Sumber: data primer diolah, 2016

Adapun data obyektif yang digunakan untuk mengukur tata kelola kota



adalah Partisipatori dalam hal ini adanya website atau portal resmi yang lengkap dengan data dan informasi yang terkini, interaktif (bisa diakses dan direspons) oleh setiap warga, untuk setiap dinas teknis dan keragaman partisipan atau keterwakilan pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan.

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Grobogan masuk kriteria cukup baik dengan pencapaian antara harapan dan kenyataan 57%. Pencapaian Kabupaten Grobogan memiliki nilai skor tertinggi dalam tata kelola kota dalam hal: a) Pengurusan kartu identitas dan perijinan mudah, cepat dan tanpa pungutan biaya apapun b) Keberadaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Warga menjadi lebih partisipatif dan peduli dalam upaya perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata ruang di permukiman. Sedangkan menurut persepsi masyarakat hal yang paling jelek dalam hal tata kelola kota adalah masih rendahnya partisipasi dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan prasarana, sarana atau fasilitas publik. Partisipasi ini dalam bentuk ikut berbicara, memberi masukan (gagasan, saran dan kritik) dalam suatu pertemuan para pemangku kepentingan yang dihadiri oleh dewan legislatif. Hasil penelitian ini mendukung (Sedermayanti, 2003) dan (Wijayanti, 2012) bahwa partisipasi masyarakat penting dalam tata kelola pemerintahan yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan

implementasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dampak kebijakan.

Indikator data obyektif dalam tata kelola kota berkaitan dengan ada dan berfungsinya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi pelayanan publik dan proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). Skor yang diperoleh dalam indikator ketersediaan teknologi sebesar 3. Indikator lain yang dijadikan acuan ketersediaan data dalam tata kelola kota adalah keberagaman partisipasi atau keterwakilan pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan dengan skor yang diperoleh sebesar 2,77. Secara kualitas ketersediaan data obyektif yang mendukung tata kelola kota di Kabupaten Grobogan masuk kriteria baik dengan pencapaian 66%. Hal ini berarti, kualitas, kuantitas dan jenis media informasi & komunikasi sebagai sarana berpartisipasi dan interaktif (masyarakat, pemerintah lokal dan dunia usaha) sudah baik. Di samping itu, keragaman latar belakang institusi dari partisipan atau keterwakilan pemangku kepentingan dan kesetaraan gender dalam proses pembangunan sudah berjalan baik namun perlu untuk ditingkatkan termasuk kesamaan gender atau keterwakilan perempuan. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat kontribusi tata kelola terhadap kota berkelanjutan sebesar 18,92%. Angka kontribusi ini merupakan angka terbesar kedua dari seluruh variabel pembentuk indeks pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai variabel utama pembentuk indeks pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan variabel prasarat untuk menuju pembangunan berkelanjutan sudah baik seperti pencapaian



antara harapan dan kenyataan meskipun perlu ditingkatkan. Kelemahan indikator tata kelola menurut persepsi masyarakat yang dinilai paling jelek adalah indikator masih rendahnya partisipasi dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan prasarana, sarana atau fasilitas publik. Partisipasi yang diharapkan adalah ikut berbicara dan memberikan masukan tidak hanya hadir dan mendengarkan diskusi dan pertemuan dengan badan legislatif daerah. Sedangkan menurut data obyektif yang perlu ditingkatkan adalah kesetaraan gender dalam partisipasi dan keterwakilan dalam pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan.

Simpulan

Hasil identifikasi indeks pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Grobogan menunjukkan skor 125,49 dengan kriteria belum berkelanjutan. Kontribusi kepemimpinan kota terhadap keberlanjutan kota sebesar 18,33% dan tata kelola kota sebesar 18,92%. Berdasarkan persepsi masyarakat kepemimpinan di Kabupaten Grobogan masuk kriteria baik sedangkan tata kelola cukup baik. Berdasarkan data obyektif kepemimpinan di Kabupaten Grobogan masuk kriteria sangat baik sedangkan tata kelola masuk kriteria baik. Kepemimpinan dan tata kelola dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan kota berkelanjutan, antara keduanya saling berkaitan.

Saran

Untuk menuju kota yang berkelanjutan, yang harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah kedekatan pucuk

pemerintahan dengan warga serta kemudahan partisipasi warga dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan sarana dan prasarana publik. Penilaian terhadap kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan di suatu wilayah harus dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim serta keunikan kebijakan yang diberlakukan setiap wilayah.

Acknowledgement

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Referensi

- Aziz, N. L. L., 2016. Peran Leadership dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan. Kolom-Pusat Penelitian Politik LIPI, 30 November, p. 1.
- Dijk, M. P. v. & Mingshun, Z., 2005. Sustainability indices as a tool for urban managers, evidence from four medium-sized Chinese cities. *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 25, pp. 667-688.
- Fauzi, A. & Oxtavianus, A., 2014. The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 68-83.
- Gray, D., Laing, R. & Docherty, I., 2017. Delivering lower carbon urban transport choices: European ambition meets the reality of institutional (mis)alignment. *Environment and Planning*, 49(1), p. 226-242.
- Kuncoro, M., 2010. Masalah, Kebijakan,



- dan Politik Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Lee, Y.-J. & Huang, C.-M., 2007. Sustainability Index for Taipei. Environmental Impact Assessment Review, Volume 27, pp. 505-521.
- Pujiati, A., 2014. Analisis Spasial Kota Hijau dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.
- Pujiati, A., 2015. Peluang Kota Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Semarang, Universitas Stikubank.
- Pujiati, A., Bowo, P. A. & Nihayah, D. M., 2016. Model Neraca Daya Saing Daerah Berbasis Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan, 2016: Universitas Negeri Semarang.
- Pujiati, A., Santosa, P. B., Sarungu, J. & Soesilo, A., 2013. The Determinants of Green and Non Green City: An Empirical Research in Indonesia. American International Journal of Contemporary Research, 3(8), pp. 83-94.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A., 2015. Perilaku Organisasi. 16 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedermayanti, 2003. Good Governance (Pemerintah yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Pt Mandar Maju.
- Statistik, B. P., 2000. Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Karakteristik Tujuh Wilayah Aglomerasi Perkotaan di Indonesia 1990 – 1995,, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P., 2016. Kabupaten Grobogan dalam Angka, Grobogan: Badan Pusat Statistik.
- SUD, F. I., 2013. Proses Perhitungan Indeks Pembangunan Kota Berkelanjutan, Batam: SUD-FI.
- Toha, M., 2007. Kepemimpinan dalam Manajemen. 12 penyunt. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. & Smith, 2006. Pembangunan Ekonomi. Kesembilan penyunt. Jakarta: Erlangga.
- WCED, W. C. f. E. a. D., 1987. Our Common Future, Oxford: Oxford: Oxford University Press.
- Wijayanti, L., 2012. Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 8(2), pp. 126-137.
- Xiao, G., Xue, L. & Woetzel, J., 2010. The Urban Sustainability Index:A New Tool for Measuring China's Cities, Shanghai: A joint initiative of Columbia University, Tsinghua University, and McKinsey & Company.